



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi perlu diwujudkan sejak penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip;
- b. bahwa untuk mempermudah dalam pemberkasan, penataan dan pengelolaan arsip secara sistematis dan terpadu agar dapat ditemukan dengan cepat, tepat, dan benar, perlu diatur klasifikasi arsip di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis;
 8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan/atau diterima oleh Komisi dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
5. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Komisi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip di lingkungan Komisi.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
11. Sentral Arsip Aktif (*Central File*) adalah tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip secara efisien, efektif, dan aman.
12. Folder adalah wadah untuk menyimpan naskah-naskah transaksi.
13. *Guide*/Sekat adalah pembatas/penyekat antara kelompok berkas yang satu dengan berkas yang lain atau penunjuk antara

- kode yang satu dengan yang lain sesuai dengan pembagian.
14. *Filing Cabinet* adalah sarana untuk menyimpan Arsip Aktif yang sudah ditata.
 15. Label adalah kertas yang ditempelkan di *tab guide* atau folder.
 16. Pelabelan adalah realisasi dari kegiatan penentuan indeks dan kode.
 17. *Out Indicator* adalah alat yang digunakan untuk menandai keluarnya Arsip dari laci atau *Filing Cabinet*.
 18. Indeks adalah tanda pengenal Arsip atau judul berkas Arsip yang berfungsi untuk membedakan antara berkas Arsip yang satu dengan berkas Arsip yang lain dan sebagai sarana bantu untuk memudahkan penemuan kembali Arsip.
 19. Tunjuk Silang adalah sarana bantu penemuan kembali untuk menunjukkan adanya arsip yang memiliki hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain atau yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama atau untuk menunjukkan tempat penyimpanan Arsip yang berbeda karena bentuknya yang harus disimpan terpisah.
 20. Berkas adalah himpunan Arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki kesamaan jenis kegiatan/peristiwa dan/atau kesamaan masalah.
 21. Isi Berkas adalah satu atau beberapa item Arsip yang merupakan informasi dari berkas kegiatan/peristiwa, yang mencerminkan penyelesaian program/kegiatan.
 22. Indeks Arsip adalah kata tangkap atau kata kunci yang merupakan representasi isi suatu unit informasi.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip Komisi merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Komisi dalam pengelolaan arsip dinamis.
- (2) Klasifikasi Arsip Komisi menggunakan kode dan indeks klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka, dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip aktif di lingkungan Komisi.
- (3) Kode klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja.
- (4) Indeks Arsip sebagai kata tangkap atau kata kunci yang merupakan representasi isi suatu unit informasi.
- (5) Klasifikasi Arsip Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman pemberkasan arsip aktif di unit pengolah di lingkungan Komisi, hanya untuk arsip yang bersifat administratif atau korespondensi saja tidak termasuk arsip perseorangan (*personal file*) dan jenis arsip non administratif lainnya yang tidak menggunakan sistem pemberkasan alfanumerik ini.

Pasal 3

Klasifikasi Arsip Komisi terdiri atas:

- a. Arsip Fasilitatif; dan
- b. Arsip Substantif.

Pasal 4

Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan fungsi penunjang/*supporting* tugas pokok Komisi, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. hukum;
- d. organisasi dan tatalaksana;
- e. hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. kerja sama;
- g. kepastakaan;
- h. kepegawaian/sumber daya manusia;
- i. perlengkapan;
- j. kerumahtanggaan;
- k. tata usaha;
- l. kearsipan;
- m. pendidikan dan pelatihan;
- n. data dan informasi; dan/atau
- o. pengawasan internal.

Pasal 5

Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan fungsi dan tugas pokok Komisi, meliputi:

- a. ekonomi;
- b. kebijakan persaingan usaha;
- c. advokasi persaingan dan kemitraan;
- d. investigasi;
- e. merger dan akuisisi;
- f. pengawasan kemitraan;
- g. penindakan;
- h. sidang majelis; dan/atau
- i. eksekusi.

Pasal 6

- (1) Kode Klasifikasi Arsip diterapkan berdasarkan permasalahan pada isi informasi Arsip, paling banyak 6 (enam) digit.
- (2) Permasalahan dalam Klasifikasi Arsip terdiri atas:
 - a. pokok masalah;
 - b. sub pokok masalah; dan
 - c. sub-sub pokok masalah.
- (3) Pokok masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan masalah utama yang terdapat pada klasifikasi arsip yang diberi kode huruf ganda.
- (4) Sub pokok masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bagian dari pokok masalah yang diberi kode angka secara berurutan.
- (5) Sub-sub pokok masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari sub pokok masalah yang diberi kode angka secara berurutan.

Pasal 7

Kode Klasifikasi Arsip Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi ini.

Pasal 8

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KLASIFIKASI ARSIP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

I. FASILITATIF

PR PERENCANAAN

PR.01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

01.01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) KOMISI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Komisi Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 Tahun.

01.02

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) KOMISI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 Tahun.

01.03

Rencana Strategis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Komisi untuk periode 5 Tahun.

PR.02 Rencana Kerja Tahunan

02.01 Usulan unit kerja dan satuan kerja beserta data pendukung

Naskah-naskah yang berhubungan dengan rencana kerja tahunan yang meliputi usulan unit kerja dan satuan kerja beserta data pendukungnya.

02.02 Penelaahan usulan unit kerja

Naskah-naskah yang berhubungan dengan rencana kerja tahunan penelaahan usulan unit kerja terkait perencanaan kegiatan unit kerja.

02.03

Program Kerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan program kerja tahunan.

PR.03 Perencanaan Anggaran

03.01 Pagu Indikatif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pagu indikatif yang terdiri dari Surat Edaran Bersama (SEB), surat pembahasan pengalokasian anggaran pagu indikatif, TOR dan RAB dari unit kerja, formulir pagu indikatif, dan dokumen *Trilateral Meeting*.

03.02 Pagu Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pagu anggaran, yang meliputi surat edaran bersama (SEB), surat pembahasan pengalokasian anggaran pagu anggaran, TOR dan RAB dari unit kerja, formulir pagu anggaran, dokumen *trilateral meeting*, surat pengantar pagu anggaran, rencana kerja anggaran, formulir 1, 2, 3, daftar pagu anggaran, lembar persetujuan DPR RI, catatan penelaahan pagu anggaran.

03.03 Pagu Alokasi Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pagu alokasi anggaran, termasuk surat edaran bersama (SEB), surat pembahasan pengalokasian anggaran pagu, TOR dan RAB dari unit kerja, formulir pagu alokasi anggaran, surat pengantar pagu alokasi anggaran, rencana kerja anggaran, formulir 1, 2, 3, daftar pagu alokasi anggaran per satuan kerja, lembar persetujuan DPR RI, catatan penelaahan pagu anggaran, catatan penelaahan pagu alokasi anggaran dan dokumen KRISNA.

03.04 Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

03.05 Standar Biaya Khusus (SBK)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar biaya khusus (SBK) Komisi.

PR.04 Revisi Anggaran

04.01 Revisi DIPA dan POK

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan optimalisasi anggaran melalui revisi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), baik revisi anggaran yang merupakan kewenangan Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

04.02 Revisi Anggaran yang bersumber dari PNBP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan revisi anggaran yang bersumber dari PNBP.

PR.05 Dokumen Rapat Dengar Pendapat di DPR RI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen rapat dengar pendapat (RDP) tentang pembahasan program dan anggaran di DPR RI mulai dari undangan rapat sampai risalah rapat dengar pendapat DPR RI.

PR.06 Penetapan Kinerja

06.01 Pimpinan dan Anggota Komisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja Pejabat di lingkungan Komisi termasuk Pimpinan dan Anggota Komisi.

06.02 Pimpinan Unit Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja Pejabat di lingkungan Komisi termasuk Pejabat setingkat Eselon I dan Eselon II.

PR.07 Monitoring dan Evaluasi

07.01 Monitoring dan Evaluasi Berkala

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala yang telah dicapai oleh Komisi.

07.02 Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja dan Lembaga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program unit kerja dan lembaga Komisi.

07.03 Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi capaian perjanjian kinerja Komisi.

PR.08 Penyusunan Laporan Kinerja

08.01 Laporan Berkala

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala Komisi termasuk laporan kinerja bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

08.02 Laporan Kinerja (LAKIN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Komisi, LKIP Sekretariat Jenderal dan Kedeputian, LKIP Biro dan Direktorat, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

08.03 Laporan *Incidental*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan *incidental* Komisi.

KU KEUANGAN

KU.01 Pelaksanaan Anggaran

01.01 Pendapatan Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendapatan anggaran di Komisi yang termasuk surat setoran pajak, bukti penerimaan negara bukan pajak, bukti setor bunga/jasa giro bank.

01.02 Belanja Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja anggaran di Komisi yang terdiri dari dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk barang habis pakai, barang inventaris berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak (tanah/bangunan) dan jasa.

01.03 Daftar Gaji/Tunjangan/Honorarium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja anggaran di Komisi yang terkait dengan daftar gaji/tunjangan/honorarium.

01.04 Dokumen pembayaran keuangan negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja anggaran di Komisi termasuk surat perintah membayar (SPM) beserta data pendukungnya.

01.05 Laporan realisasi anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan realisasi anggaran Komisi.

01.06 Pengembalian belanja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja termasuk surat setoran pengembalian belanja (SSPB), surat setoran bukan pajak (SSBP).

KU.02 Dokumen Akuntansi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen akuntansi perbendaharaan termasuk Berita acara pemeriksaan kas,

kas/register penutupan kas, Arsip Data Komputer (ADK), Berita acara rekonsiliasi antara satuan kerja dan KPPN.

- KU.03 Laporan Keuangan**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan keuangan Komisi termasuk laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca, dan penyusunan catatan atas laporan keuangan (CALK).
- KU.04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyelesaian kerugian negara termasuk tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- KU.05 Bantuan atau Hibah Luar Negeri**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengesahan bantuan atau hibah luar negeri sampai pertanggungjawaban keuangan bantuan atau hibah luar negeri.
- KU.06 Pertanggungjawaban Keuangan Negara**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Komisi, dan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal.
- HK**
HK.01 HUKUM
Program Legislasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Komisi termasuk penyusunan naskah urgensi dan naskah akademik.
- HK.02 Produk Hukum**
- 02.01 Produk Hukum Internal (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum)**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan konsultasi *legal drafting* produk hukum Komisi yang bersifat mengatur seperti Peraturan Komisi, Keputusan Komisi, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur tetap (Protap), atau Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran (SE) di bidang Pengawasan Persaingan Usaha mulai dari persiapan, analisis, penyusunan rancangan awal sampai rancangan akhir, telaah hukum, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, harmonisasi sampai dengan pengesahannya.
- 02.02 Produk Hukum Eksternal**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan konsultasi *legal drafting* produk hukum eksternal di bidang Pengawasan Persaingan Usaha termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain.
- HK.03 Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri**
Naskah-naskah yang berkaitan perjanjian dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum, serta memuat kerja sama antara Komisi atau Sekretariat Jenderal yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan

kewajiban dibidang hukum publik yang bersifat treaty contract, mulai dari Nota Kesepahaman/ MoU, perjanjian kerja sama, telaah atau kajian atau evaluasi dan pertimbangan hukum, risalah rapat pembuatan MoU, rancangan MoU dan rancangan perjanjian kerja sama.

- HK.04 Bantuan Hukum/ Konsultasi Hukum**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan hukum seperti sidang-sidang terkait gugatan yang ditujukan Komisi selaku lembaga serta konsultasi hukum seperti konsultasi dengan stakeholder atau dengan internal Komisi tetapi tidak sampai mengeluarkan legal opinion.
- HK.05 Telaah Hukum**
- 05.01 Telaah Hukum Internal**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internal.
- 05.02 Telaah Hukum Eksternal**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum eksternal.
- 05.03 Telaah Hukum Perjanjian/ Kerja Sama**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan hukum perjanjian/kerja sama.
- 05.04 Telaah Hukum Akta**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan hukum akta.
- HK.06 Sosialisasi Produk Hukum**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi produk hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada kementerian atau Lembaga, instansi pemerintah dan non-pemerintah yang terkait, maupun internal di Komisi.
- HK.07 Kasus Hukum Perdata/Pidana**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus hukum perdata/pidana di Komisi.
- OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**
- OT.01 Struktur Organisasi dan Tata Kerja KOMISI**
- 01.01 Pembentukan, Pengembangan/Pembubaran Organisasi**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan, pengembangan atau pembubaran organisasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 01.02 Analisis Organisasi**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis organisasi termasuk pendirian dan pembentukan Komisi mulai dari undangan, notulensi rapat, naskah urgensi, rancangan bagan, struktur organisasi dan rancangan peraturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
- 01.03 Evaluasi Kelembagaan**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi organisasi untuk proses perubahan dan penyempurnaan organisasi mulai dari undangan, notulensi rapat, naskah urgensi, rancangan bagan dan struktur organisasi, dan rancangan peraturan SOTK.

OT.02 Analisis Jabatan

02.01 Analisis Jabatan Struktural

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural mulai dari undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, peraturan tentang jabatan struktural dan formulir analisis jabatan struktural.

02.02 Analisis Jabatan Fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional mulai dari undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, peraturan tentang jabatan fungsional dan formulir analisis jabatan fungsional.

02.03 Analisis Jabatan Pelaksana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan pelaksana.

OT.03 Standar Kompetensi

03.01 Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural mulai dari undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, Peraturan tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural, dan Formulir standar kompetensi jabatan struktural.

03.02 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional mulai dari undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, Peraturan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional dan Formulir standar kompetensi jabatan fungsional.

03.03 Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan pelaksana mulai dari undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, Peraturan tentang Standar Kompetensi Jabatan pelaksana.

OT.04 Analisis Beban Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja jabatan dan unit kerja serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja termasuk analisis beban kerja struktural, analisis beban kerja fungsional dan analisis beban kerja pelaksana.

OT.05 Tata Laksana

05.01 Penetapan atau penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan atau penyelarasan SOP mulai dari usulan SOP Unit, pembahasan SOP, pengesahan SOP, sampai dengan evaluasi implementasi SOP.

05.02 Tata Hubungan Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatalaksanaan hubungan kerja antar struktural, antar fungsional, antar pelaksana, antara struktural dan fungsional, antara struktural dan pelaksana serta antara fungsional dan pelaksana.

OT.06

Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) termasuk manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berupa notulensi rapat, undangan rapat dan dokumen pendukung lainnya.

HM

HUBUNGAN MASYARAKAT & KEPROTOKOLAN

HM.01

Keprotokolan

01.01 Penyelenggaraan Acara Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, serah terima jabatan, peresmian dan seremonial lainnya yang berupa foto, undangan, video, dan lain-lain.

01.02 Dokumen Penerimaan Tamu Anggota Komisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan tamu Anggota Komisi termasuk buku tamu dan daftar alamat.

01.03 Agenda Kegiatan Anggota Komisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda mingguan atau bulanan Anggota Komisi.

01.04 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri Anggota Komisi dan Pejabat lain atau Pegawai berupa surat tugas, undangan, laporan kegiatan, foto, dan lain-lain.

HM.02

Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

02.01 Publikasi Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyampaian informasi kegiatan Komisi kepada media massa, mitra kerja, dan masyarakat serta pihak eksternal lainnya.

02.02 Publikasi Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi dan publikasi internal antar unit kerja Komisi.

HM.03

Hubungan Antar Lembaga

03.01 Lembaga Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan kegiatan hubungan antar Lembaga Komisi dengan Lembaga pemerintah.

03.02 Organisasi Sosial/LSM

Naskah-naskah yang berkaitan kegiatan hubungan antar Lembaga Komisi dengan Organisasi Sosial/LSM.

03.03 Perusahaan

Naskah-naskah yang berkaitan kegiatan hubungan antar Lembaga Komisi dengan Perusahaan.

03.04 Perguruan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan kegiatan hubungan antar Lembaga Komisi dengan Perguruan Tinggi.

03.05 Media Massa

Naskah-naskah yang berkaitan kegiatan hubungan antar Lembaga KOMISI dengan Media Massa berupa siaran pers/konferensi pers/press release/wawancara, serta kunjungan wartawan/peliputan.

03.06 Forum Kehumasan (Bakohumas)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterlibatan Komisi dalam kegiatan Forum Badan Koordinasi hubungan masyarakat (Bakohumas) antara lain seminar atau bimbingan teknis dan *government visit*.

HM.04 *Hearing* DPR

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *hearing* DPR mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

HM.05 Pameran/Sayembara/ Lomba/ Festival/ Pembuatan Spanduk dan Iklan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran/sayembara/ lomba/ festival/ pembuatan spanduk dan iklan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

HM.06 Penghargaan dan Tanda Kenang-kenangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tukar-menukar kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi berupa pemberian penghargaan, plakat, sertifikat, dan lain-lain.

HM.07 Pemberian Ucapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa, permohonan maaf dan lain-lain.

HM.08 Pengumpulan, Pengolahan Informasi dan Penyajian Informasi Kelembagaan/PPID

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan informasi berupa klipings koran, brosur, leaflet, poster, plakat dan pengumuman serta penyajian informasi kelembagaan/PPID.

- HM.09 Pendokumentasian/ Liputan Kegiatan KOMISI**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendokumentasian kegiatan, bahan, dan liputan kegiatan Komisi.
- HM.10 Penerbitan Majalah, Buletin, dan Jurnal KOMISI**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan majalah, buletin dan jurnal Komisi.
- KS**
- KS.01 KERJA SAMA**
- 01.01 Kerja Sama Dalam Negeri**
- 01.01 Korespondensi**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan korespondensi yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan kerja sama antara Komisi dengan lembaga/ instansi (Kementerian/Lembaga, Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Universitas dan Perguruan Tinggi, Organisasi dan Swadaya Masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia.
- 01.02 Penyusunan naskah kerja sama**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan naskah kerja sama dalam negeri antara Komisi dengan lembaga/ instansi (Kementerian/Lembaga, Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Universitas dan Perguruan Tinggi, Organisasi dan Swadaya Masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia.
- 01.03 Telaah/Kajian Pertimbangan Hukum**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaah/kajian pertimbangan hukum yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan kerja sama dalam wilayah Republik Indonesia.
- 01.04 Risalah Rapat Pembuatan MoU**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan risalah rapat dalam rangka kegiatan rapat pembuatan MoU yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan kerja sama dalam negeri.
- Naskah MoU**
- 01.05** Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan naskah MoU antara Komisi dengan lembaga/ instansi (Kementerian/Lembaga, Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Universitas dan Perguruan Tinggi, Organisasi dan Swadaya Masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia.
- Berkas Penandatanganan**
- 01.06** Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penandatanganan berkas MoU kerja sama dalam negeri antara Komisi dengan lembaga/ instansi (Kementerian/Lembaga, Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Universitas dan Perguruan Tinggi, Organisasi dan Swadaya Masyarakat.
- KS.02 Kerja Sama Luar Negeri**
- 02.01 Korespondensi**
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan korespondensi antara Komisi dengan Lembaga/ instansi terkait negosiasi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di luar wilayah Republik Indonesia.

02.02 Penyusunan naskah kerja sama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan naskah kerja sama luar negeri antara Komisi dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah di luar wilayah Republik Indonesia.

02.03 Telaah/ kajian pertimbangan hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan telaah/kajian pertimbangan hukum atas naskah kerja sama luar negeri antara Komisi dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah di luar wilayah Republik Indonesia.

02.04 Risalah rapat pembuatan MoU

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan risalah rapat pembuatan MoU dalam rangka kegiatan rapat pembuatan MoU yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan kerja sama luar negeri.

02.05 Naskah MoU

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan naskah MoU antara Komisi dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah di luar wilayah Republik Indonesia.

KS.03 Kerja Sama Bantuan Teknis dan Hibah dengan Organisasi Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan kerja sama antara Komisi dengan Organisasi Internasional di Luar Negeri terkait dengan bantuan teknis dan hibah.

KS. 04 Monitoring dan Evaluasi Kerja sama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri antara Komisi dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, terdiri dari :

- data dan informasi;
- peningkatan kapasitas SDM;
- penelitian bersama;
- laporan

KS. 05 Database dan Dokumentasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan database dan dokumen termasuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antar lembaga dalam wilayah Republik Indonesia, dan perjanjian internasional serta nota kesepahaman kerja sama antar Lembaga di luar wilayah Republik Indonesia.

KT KEPUSTAKAAN

KT.01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka

01.01 Bukti penerimaan koleksi bahan Pustaka deposit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyimpanan deposit bahan Pustaka termasuk bukti penerimaan koleksi bahan Pustaka deposit.

01.02 Administrasi Pengolahan Deposit bahan Pustaka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pengolahan deposit bahan pustaka.

KT.02 Pengelolaan Bahan Pustaka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan layanan perpustakaan kepada pengguna terdiri dari :

- buku induk koleksi;
- daftar buku terseleksi;
- daftar buku dalam pemesanan;
- daftar buku dalam permintaan;
- daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah;
- daftar pengiriman bahan pustaka surplus;
- lembar kerja pengolahan BP (Buras dan Pengkatalogan);
- *Shelf List* atau Jajaran kartu utama (master list);
- daftar tambahan buku (*assesion list*); dan
- daftar atau jajaran kendali (subyek dan pengarang).

KT.03 Layanan Informasi

03.01 Layanan Peminjaman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan informasi berupa layanan peminjaman di perpustakaan Komisi.

03.02 Pengunjung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pengunjung dalam rangka kunjungan ke perpustakaan Komisi.

03.03 Layanan Rujukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan rujukan.

03.04 Keanggotaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas keanggotaan perpustakaan Komisi.

03.05 Layanan Silang Layang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan silang layang dalam rangka pengembangan perpustakaan Komisi.

KP KEPEGAWAIAN/ SUMBER DAYA MANUSIA

KP.01 Bezetting atau Persediaan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *besetting* atau persediaan pegawai.

KP.02 Pengadaan Pegawai

02.01 Penerimaan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan pegawai Komisi terdiri dari :

- 1) pengumuman;
- 2) seleksi administrasi;
- 3) pemanggilan peserta;
- 4) pelaksanaan ujian tertulis;
- 5) keputusan hasil ujian;

6) wawancara.

02.02 Penetapan Pengumuman Kelulusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pengumuman kelulusan pegawai Komisi mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

02.03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi untuk berkas lamaran pegawai yang tidak diterima.

02.04 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan pegawai yang berkaitan dengan nota usul dan kelengkapan penetapan NIP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, termasuk surat lamaran, ijazah, SKCK, Kartu Kuning, Surat Keterangan Kesehatan.

02.05 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 Tahun

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan berkas nota usul untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun.

02.06 Surat Keputusan Penetapan Calon Pegawai Komisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan calon pegawai Komisi melalui Surat Keputusan.

KP.03

Pembinaan Pegawai

03.01 Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan diklat/kursus/tugas belajar/ujian dinas/izin belajar pegawai bagi pegawai KOMISI termasuk memo dinas, surat perintah/surat tugas/SK/surat izin, laporan kegiatan dan sertifikat/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

03.02 Ujian Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ujian kompetensi pegawai Komisi yang bekerjasama dengan unit Pendidikan dan pelatihan Komisi.

03.03 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/ Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai Komisi berupa daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dan sasaran kinerja pegawai (SKP).

03.04 Pakta Integritas Pejabat Struktural

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penandatanganan pakta integritas pejabat struktural mulai dari eselon I, dan eselon II di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

03.05 Bimbingan Rohani

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan rohani pegawai dalam rangka pembinaan mental termasuk

didalamnya ceramah keagamaan, program layanan psikologi dan konseling serta pembekalan masa persiapan pensiun.

03.06 Disiplin Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai diantaranya daftar hadir dan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

03.07 Berkas Hukuman Disiplin Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat serta konseling pegawai.

03.08 Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada pegawai Komisi yang berprestasi berupa Ucapan Terima Kasih, Sertifikat Penghargaan atau tanda jasa Satyalancana bagi Pegawai Negeri Sipil.

KP.04 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai Komisi.

KP.05 Mutasi Pegawai

05.01 Diperbantukan atau Dipekerjakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutasi pegawai negeri sipil yang diperbantukan dan dipekerjakan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

05.02 Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelantikan pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa berita acara pelantikan dan serah terima jabatan.

05.03 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku.

05.04 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional berdasarkan Peraturan Komisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural berdasarkan peraturan Komisi.

05.05 Mutasi Keluarga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada susunan keluarga Pegawai Komisi yang meliputi perkawinan, perceraian, kelahiran anak, kematian suami/isteri, dan kematian anak Pegawai.

05.06 Peninjauan Masa Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peninjauan masa kerja pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

05.07 Berkas Baperjakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari

jabatan struktural Eselon II ke bawah di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Fasilitas Magang Kerja Eksternal

KP.06

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitas magang kerja eksternal misalnya dari Kampus/Universitas.

Piutang Ikatan Dinas

KP.07

Naskah-naskah yang berkaitan dengan piutang ikatan dinas pegawai sesuai dengan perjanjian kontrak pegawai.

Administrasi Pegawai

Daftar Nominatif Pengajuan Pengurusan Gaji

KP.08

08.01

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan gaji pegawai Komisi berupa daftar nominatif dan lampirannya.

Cuti Pegawai

08.02

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti pegawai mulai dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti izin belajar, cuti bersama dan cuti diluar tanggungan negara.

Dokumentasi Identitas Pegawai

08.03

Naskah-naskah yang berkaitan dengan identitas pegawai mulai dari kartu pegawai Komisi, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P) dan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4).

Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan

08.04

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan.

Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala

08.05

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas pengurusan kenaikan gaji berkala pegawai.

KP.09

Kesejahteraan Pegawai

09.01 Berkas Layanan Asuransi Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan asuransi Kesehatan atau asuransi ketenagakerjaan.

09.02 Berkas Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, general *check up* pejabat dan lain-lain.

09.03 Berkas Layanan Bantuan Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan layanan bantuan sosial.

09.04 Berkas Layanan Kedukaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan kedukaan di Komisi.

09.05 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan olahraga dan rekreasi.

KP.10 Pemberhentian Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

KP.11 Perselisihan/ Sengketa Kepegawaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/ sengketa kepegawaian.

KP.12 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan usulan pemberhentian pegawai dan penetapan pensiun pegawai di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PL PERLENGKAPAN (UMUM)

PL.01 Pengadaan Barang dan Jasa

01.01 Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan usulan dan analisa kebutuhan barang dan jasa dari unit kerja berupa daftar kebutuhan barang dan jasa, Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dan lainnya.

01.02 Pelaksanaan dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa dan penyusunan laporan hasil pengadaan barang dan jasa.

PL.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan Barang Milik Negara sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PL.03 Pengelolaan Barang

03.01 Penatausahaan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara

03.02 Monitoring BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan Barang Milik Negara.

03.03 Penghapusan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN termasuk Risalah Lelang, Surat Pengajuan Penghapusan, Surat Keputusan Tim, Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Barang, Surat Keterangan Barang Rusak Berat, Berita Acara Penilaian dan Penelitian, Pengumuman atau Iklan Lelang, dan Berita Acara Penghapusan BMN.

03.04 Dokumen Kepemilikan Aset atau Kekayaan Komisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan aset atau kekayaan Komisi berupa sertifikat tanah, sertifikat

gedung/rumah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), Berita Acara Serah Terima, dan lain-lain.

RT **KERUMAHTANGGAAN**

RT.01 **Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pengurusan perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai Komisi.

RT.02 **Penggunaan Fasilitas Kantor**

02.01 **Peminjaman Kendaraan Dinas**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan operasional perkantoran operasional Komisi yang meliputi peminjaman kendaraan dinas.

02.02 **Peminjaman Ruang Rapat/Konsumsi**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan operasional perkantoran operasional Komisi yang meliputi peminjaman ruangan rapat/konsumsi.

02.03 **Fasilitas Kantor Lainnya**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan operasional perkantoran operasional Komisi yang meliputi peminjaman fasilitas kantor lainnya.

RT.03 **Pengelolaan Kendaraan Dinas**

03.01 **Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan administrasi kendaraan dinas baik kendaraan beroda dua atau beroda empat berupa pengurusan pajak dan perpanjangan plat nomor kendaraan dinas Komisi.

03.02 **Pemeliharaan dan Perbaikan**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan beroda dua atau beroda empat berupa dokumen pemeliharaan kendaraan (Servis Besar atau Kecil, ataupun pengurusan BBM).

03.03 **Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kendaraan hilang dan masalahnya bagi kendaraan dinas beroda dua atau beroda empat milik Komisi.

RT.04 **Layanan Perkantoran**

04.01 **Pertamanan/ Landscaping dan penghijauan**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pertamanan/ landscaping dan penghijauan.

04.02 **Dokumen Layanan Kebersihan**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen layanan kebersihan berupa jasa outsourcing tenaga kebersihan.

04.03 **Dokumen Layanan Operasional (langganan, perbaikan, dan perawatan)**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen layanan operasional (langganan, perbaikan dan perawatan) diantaranya

biaya langganan listrik, air, telepon, internet, majalah, koran, TV kabel, air mineral, pewangi ruangan, dan lain-lain.

RT.05 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Peralatan Kantor Lainnya

05.01 Perbaikan/ Pemeliharaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan/ pemeliharaan berupa jaringan listrik, air, telepon dan peralatan kantor lainnya dikantor pusat maupun di kantor wilayah Komisi.

05.02 Pemasangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasangan listrik, air, telepon, dan peralatan kantor lainnya baik dikantor pusat maupun di kantor wilayah Komisi.

05.03 Peminjaman Peralatan Kantor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman perlengkapan kantor berupa formulir peminjaman peralatan kantor (laptop, infocus, computer, printer, scanner, alat zoom, dan lain-lain).

RT.06 Pengamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan kantor Komisi berupa daftar nama satuan pengamanan, jadwal piket, back up kamera pengawas, dokumen data pengunjung atau tamu, berita acara pengamanan, laporan kehilangan, laporan gangguan, laporan kerusakan, laporan kecelakaan, surat izin keluar masuk orang atau barang.

TU TATA USAHA

TU.01 Layanan Pimpinan/Sekretariat Jenderal/Kedeputian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pimpinan/kesekjenan/kedeputian berupa dokumen kegiatan pimpinan/kesekjenan/kedeputian dari kunjungan dinas, menghadiri undangan dinas, rapat, dan lain-lain.

TU.02 Dokumen Rapat Pimpinan/Sekretariat Jenderal/Kedeputian

02.01 Rapat Komisi/Pimpinan/Pengarah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat komisi/pimpinan/pengarah berupa undangan rapat, bahan rapat, daftar hadir, notulensi, risalah rapat, keputusan rapat dan berita acara rapat (jika ada).

02.02 Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi/rapat kerja berupa undangan rapat, bahan rapat, daftar hadir, notula, risalah rapat, keputusan rapat dan berita acara rapat (jika ada).

TU.03 Rapat Staf

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat staf berupa undangan rapat, bahan rapat, daftar hadir, dan risalah rapat, dan keputusan.

TU.04 Rumah Tangga dan Protokoler Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rumah tangga pimpinan dan pengurusan keprotokolan pimpinan dinas luar negeri.

KA
KA.01

KEARSIPAN
Persuratan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk dan surat keluar berupa pencatatan pada buku agenda/ kartu kendali, lembar pengantar/buku ekspedisi/formulir penggandaan, dan sebagainya.

KA.02

Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemeliharaan arsip termasuk pembuatan daftar arsip aktif (daftar berkas dan daftar isi berkas), daftar arsip inaktif, daftar arsip vital, dan berkas fumigasi.

KA.03

Persetujuan dan Penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan peraturan jadwal retensi arsip termasuk surat persetujuan Jadwal Retensi Arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

KA.04

Alih Media Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih media arsip, termasuk berita acara alih media arsip dan daftar arsip yang dialihmediakan.

KA.05

Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan arsip mulai dari peminjaman dan penggunaan arsip melalui Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) termasuk buku peminjaman arsip dan formulir peminjaman.

KA.06

Penyusutan Arsip

06.01 Pemindahan Arsip Inaktif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan, termasuk pembuatan berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan.

06.02 Pemusnahan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip mulai dari pembentukan panitia pemusnahan arsip, notulen rapat panitia penilai, persetujuan pemusnahan arsip dari ANRI, Surat Keputusan Pemusnahan, Berita Acara Pemusnahan, dan Daftar Arsip yang dimusnahkan.

06.03 Penyerahan Arsip Statis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis mulai dari pembentukan panitia penilai, notulen rapat panitia penilai, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat Persetujuan Kepala ANRI, Surat pernyataan Ketua Komisi bahwa arsip autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan, Keputusan penetapan penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, dan Daftar Arsip yang Diserahkan.

KA.07 Pembinaan Kearsipan

07.01 Apresiasi atau sosialisasi atau penyuluhan atau lomba kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan apresiasi atau sosialisasi atau penyuluhan atau lomba kearsipan mulai dari perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

07.02 Bimbingan Teknis Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis kearsipan atau bimbingan konsultasi kearsipan mulai dari perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

07.03 Supervisi atau Monitoring Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi atau pengawasan atau monitoring atau evaluasi mulai dari perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

07.04 Pengawasan Kearsipan Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kearsipan internal mulai dari pembentukan tim pengawasan kearsipan internal, Rencana Kerja Audit (RKA), Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS), dan Laporan Audit Kearsipan Internal.

PD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PD.01 Perencanaan

01.01 Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman-pedoman kediklatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

01.02 Penyusunan Kurikulum Diklat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan manual pendidikan dan pelatihan HAM termasuk kurikulum-kurikulum diklat.

01.03 Penyusunan Modul Diklat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan manual pendidikan dan pelatihan HAM termasuk modul-modul diklat.

PD.02 Pelaksanaan

02.01 Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjurangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diklat penjurangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.

02.02 Kursus/Diklat Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi kursus/diklat teknis.

PD.03 Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat berupa laporan, dan database peserta Diklat.

DI DATA DAN INFORMASI

DI.01 Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan sistem informasi.

DI.02 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi, Sistem Aplikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem atau aplikasi basis data dan informasi.

DI.03 Layanan Website

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan website.

DI.04 Perekaman dan Pemutakhiran Data

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perekaman dan pemutakhiran data diantaranya formulir isian, daftar petugas perekaman, jadwal pelaksanaan, dan laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data.

DI.05 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan migrasi sistem aplikasi dan data diantaranya perencanaan migrasi, pelaksanaan migrasi, berita acara kegiatan migrasi, daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi, dan laporan hasil migrasi.

DI.06 Dokumen Hosting

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hosting diantaranya formulir permintaan hosting, laporan uji hasil kelayakan dan laporan pelaksanaan hosting.

PI PENGAWASAN INTERNAL

PI.01 Rencana Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rencana pengawasan Komisi termasuk rencana strategis pengawasan, rencana kerja tahunan, dan rencana kinerja tahunan.

PI.02 Pelaksanaan Pengawasan (Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan)

02.01 Pelaksanaan Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang memerlukan tindak lanjut mulai dari audit, review, evaluasi dan pemantauan berupa laporan, saran tindak lanjut, perumusan rekomendasi, pengawasan internal, dan berita acara pemeriksaan.

02.02 Pelaksanaan Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan mulai dari audit, review, evaluasi dan pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut.

02.03 Pelaksanaan pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dan mengandung unsur tindak pidana korupsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dan mengandung unsur tindak pidana korupsi.

PI.03 Laporan Harta Kekayaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian laporan harta kekayaan berupa LHKPN dan LHKASN.

PI.04 Ganti Rugi Aset

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen yang terkait dengan ganti rugi aset apabila terjadi kehilangan aset.

II. SUBSTANTIF

EM EKONOMI (KAJIAN PERILAKU PELAKU USAHA)

EM.01 Pengkajian/ Penelitian Inisiatif dan Pemantauan Pelaku Usaha

01.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan pengkajian/ penelitian inisiatif, dan pemantauan pelaku usaha tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, meliputi:

- 1) Rencana Kerja atau TOR;
- 2) SK untuk Satgas;
- 3) MoU dengan pihak Swakelola;
- 4) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak Swakelola;
- 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pihak Swakelola;
- 6) Risalah Rapat dengan pelaku usaha;

01.02 Pengumpulan Data dan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi kegiatan pengkajian/ penelitian inisiatif, dan pemantauan pelaku usaha tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, meliputi:

- 1) Studi literatur;
- 2) Data pihak-pihak terkait;
- 3) Undangan diskusi/FGD;
- 4) Daftar hadir diskusi;
- 5) Risalah diskusi;
- 6) Dokumen keuangan;
- 7) Risalah narasumber;
- 8) Data *stakeholder*;
- 9) Dokumentasi penelitian lapangan serta dokumentasi lainnya.

Pengolahan Data dan Informasi

01.03 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi kegiatan pengkajian/ penelitian inisiatif, dan pemantauan pelaku usaha tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

Analisis Kebijakan

01.04

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis kebijakan apakah terdapat kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha.

01.05

Laporan Hasil Kajian Pelaku Usaha

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan laporan hasil kajian termasuk rekomendasi, penyampaian hasil kajian ke rapat koordinasi, dan memo ke Direktorat Investigasi apabila hasil penelitian dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

EM.02

Pengembangan Indeks Persaingan Usaha

02.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan Pengembangan Indeks Persaingan, meliputi :

- 1) Rencana Kerja atau TOR;
- 2) SK untuk Satgas;
- 3) MoU dengan pihak Swakelola;
- 4) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak Swakelola;
- 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pihak Swakelola;
- 6) Dokumen keuangan.

02.02 Pengumpulan Data dan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi kegiatan Pengembangan Indeks Persaingan, meliputi :

- 1) Studi literatur;
- 2) Data pihak-pihak terkait;
- 3) Data stakeholder;
- 4) Kuesioner Indeks Persaingan Usaha;
- 5) Responden terkait *Indepth Interview* Indeks Persaingan Usaha;
- 6) Dokumentasi penelitian lapangan;
- 7) Dokumentasi lainnya;
- 8) Koordinasi dengan Kantor Wilayah;

Pengolahan Data dan Informasi

02.03

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi kegiatan Pengembangan Indeks Persaingan, meliputi :

- 1) Daftar hadir diskusi/FGD;
- 2) Risalah Diskusi

Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha

02.04

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan akhir kajian indeks persaingan usaha di Indonesia.

Ringkasan Eksekutif Indeks Persaingan Usaha

02.05

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ringkasan eksekutif indeks persaingan usaha termasuk *executive summary* dan surat penyampaian Ringkasan Eksekutif Indeks Persaingan Usaha kepada Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur BI, Kepala BPS, Kepala BKPM dan Ketua Umum Kadin Indonesia.

KB

KEBIJAKAN PERSAINGAN

KB.01

Evaluasi Kebijakan Persaingan Usaha

01.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan evaluasi kebijakan persaingan usaha yang meliputi:

- 1) Rencana Kerja atau TOR;
- 2) SK untuk Satgas;
- 3) MoU dengan pihak swakelola;
- 4) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak swakelola;
- 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pihak swakelola;
- 6) Risalah Rapat;

01.02 Pengumpulan Data dan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi kegiatan evaluasi kebijakan persaingan usaha yang meliputi:

- 1) Studi literatur;
- 2) Data pihak terkait;
- 3) Undangan rapat;
- 4) Daftar hadir diskusi/FGD;
- 5) Risalah diskusi;
- 6) Dokumen keuangan;
- 7) Risalah narasumber;
- 8) Data stakeholder;
- 9) Dokumentasi penelitian lapangan serta dokumentasi lainnya.

Koordinasi dengan Kantor Wilayah

01.03 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dengan kantor wilayah untuk evaluasi kebijakan persaingan usaha.

Pengolahan Data dan Informasi

01.04 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi serta analisisnya untuk evaluasi kebijakan persaingan usaha.

Analisis Kebijakan

01.05 Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis kebijakan apakah terdapat kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha.

Pembuatan Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan

01.06 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan laporan hasil evaluasi kebijakan termasuk rekomendasi, penyampaian hasil evaluasi kebijakan, dan surat saran/pertimbangan bagi regulator terkait/ Presiden (jika diperlukan).

KB.02 Kajian Penyusunan Kebijakan Persaingan dan Investasi/Industrialisasi

02.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan Kajian penyusunan kebijakan persaingan dan Investasi/Industrialisasi, meliputi:

- 1) Tema kajian kebijakan;
- 2) Rencana kerja atau TOR;
- 3) Inventarisasi Kebijakan.

02.02 Kegiatan Kajian yang dilakukan Swakelola

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kajian yang dilakukan swakelola dalam rangka penyusunan kebijakan persaingan dan investasi/industrialisasi, meliputi:

- 1) Proposal dari pihak ketiga;
- 2) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga;

- 3) SK untuk Satgas;
- 4) Risalah Rapat.

Pengumpulan Data dan Informasi

02.03 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi kegiatan kajian penyusunan kebijakan persaingan dan investasi/industrialisasi, meliputi:

- 1) Studi literatur;
- 2) Data pihak-pihak terkait;
- 3) Surat undangan FGD;
- 4) Daftar hadir kegiatan diskusi/FGD;
- 5) Risalah diskusi/FGD;
- 6) Dokumen keuangan;
- 7) Risalah narasumber;
- 8) Data stakeholder;
- 9) Dokumentasi penelitian lapangan, serta dokumentasi lainnya;

Koordinasi dengan Kantor Wilayah

02.04 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dengan kantor wilayah dalam rangka kajian penyusunan kebijakan persaingan dan investasi/industrialisasi.

Pengolahan Data dan Informasi

02.05 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi kegiatan kajian penyusunan kebijakan persaingan dan investasi/industrialisasi,

Analisis Kebijakan

02.06 Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis kebijakan apakah kebijakan tersebut selaras atau tidak dengan prinsip-prinsip persaingan usaha dalam rangka kegiatan kajian penyusunan kebijakan persaingan dan investasi/industrialisasi.

Laporan Hasil Kajian Kebijakan

02.07 Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil kebijakan kegiatan kajian penyusunan kebijakan persaingan dan investasi/industrialisasi termasuk rekomendasi dan penyampaian surat saran bagi regulator terkait/Presiden (jika diperlukan).

KB.03 Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

03.01 Permintaan Tanggapan terkait Kebijakan Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan tanggapan terkait kebijakan pemerintah kegiatan harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang meliputi disposisi surat masuk, persiapan, pelaksanaan, risalah, Data dan Informasi dari pihak pemerintah.

Kegiatan Diskusi/FGD

03.02 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan diskusi/FGD dalam rangka harmonisasi kebijakan persaingan usaha meliputi surat undangan, bahan diskusi/FGD, risalah, dan laporan kegiatan.

Laporan Hasil Diskusi/FGD

03.03

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan hasil diskusi/FGD dalam rangka harmonisasi kebijakan pemerintah.

03.04 Saran Pertimbangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harmonisasi kebijakan persaingan usaha termasuk pembuatan surat pertimbangan.

KB.04 Pengembangan dan Implementasi Daftar Periksa Persaingan Usaha

04.01 Usaha

Dokumen Modul Penjelasan Daftar Periksa Assesmen Kebijakan Persaingan Usaha

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan sistem, metode dan instrumen terkait evaluasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat termasuk dokumen modul penjelasan daftar periksa assesmen kebijakan persaingan usaha.

04.02

Dokumen Permohonan dan Isian Kuesioner AKPU kepada K/L

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan sistem, metode dan instrumen terkait evaluasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat termasuk dokumen permohonan dan isian kuesioner AKPU kepada K/L.

04.03 Dokumen Undangan Koordinasi Kepada Kanwil terkait Pengisian Kuesioner AKPU

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan sistem, metode dan instrumen terkait evaluasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat termasuk dokumen memo undangan koordinasi kepada Kanwil terkait pengisian kuesioner AKPU.

AD ADVOKASI PERSAINGAN DAN KEMITRAAN

AD.01 Advokasi Persaingan Usaha

01.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan advokasi persaingan usaha ke pelaku usaha/ pemerintah/ pendidikan/ praktisi hukum/ masyarakat dan lain-lain melalui kegiatan lokakarya dosen persaingan usaha, seminar persaingan usaha, dan workshop hakim, meliputi :

- 1) Modul advokasi;
- 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) Memo Koordinasi dengan Eselon II lain;
- 4) Risalah Rapat Internal;
- 5) Presentasi pada Rapat Kerja;
- 6) Memo kepada Ketua Komisi terkait penunjukan nama Pembicara ;
- 7) Surat Perintah dari Ketua Komisi;
- 8) Surat Undangan.

01.02 Pelaksanaan Advokasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan advokasi persaingan usaha ke pelaku usaha/ pemerintah/ pendidikan/ praktisi hukum/ masyarakat dan lain-lain melalui kegiatan lokakarya dosen persaingan usaha, seminar persaingan usaha, dan workshop hakim, meliputi :

- 1) Daftar Hadir;
- 2) Materi Advokasi;
- 3) Lembar Evaluasi;
- 4) Laporan Kegiatan Advokasi Persaingan Usaha.

AD.02 Advokasi Kemitraan

02.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan advokasi kemitraan ke pelaku usaha/ pemerintah/ Pendidikan/ praktisi hukum/ masyarakat, dan lain-lain, meliputi :

- 1) Modul advokasi;
- 2) Kerangka acuan kerja;
- 3) Memo koordinasi dengan Eselon II lain;
- 4) Risalah rapat internal;
- 5) Memo kepada Ketua Komisi terkait penunjukan nama Pembicara;
- 6) Surat perintah dari Ketua;
- 7) Surat undangan.

02.02 Pelaksanaan Advokasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan advokasi kemitraan ke pelaku usaha/ pemerintah/ Pendidikan/ praktisi hukum/ masyarakat, dan lain-lain, meliputi :

- 1) Daftar hadir;
- 2) Materi advokasi;
- 3) Lembar evaluasi;
- 4) Laporan kegiatan advokasi persaingan usaha.

AD.03 Program Kepatuhan Persaingan Usaha

03.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan program kepatuhan persaingan usaha yaitu melakukan identifikasi pelaku usaha besar dan dominan terutama terkait dengan putusan perkara, meliputi : kerangka acuan kerja dan SK Satgas.

03.02 Rapat Program Kepatuhan terhadap Pelaku Usaha

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat program kepatuhan persaingan usaha yaitu melakukan identifikasi pelaku usaha besar dan dominan terutama terkait dengan putusan perkara, meliputi: daftar hadir, risalah rapat dengan pelaku usaha dan risalah rapat koordinasi eselon II.

03.03 Rapat Tindak lanjut Rapat Program Kepatuhan terhadap Pelaku Usaha

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat tindak lanjut rapat Program Kepatuhan terhadap pelaku usaha, meliputi : surat undangan permohonan program kepatuhan, memo kepada ketua komisi terjait penunjukan nama pembicara pada Tahap I dan Tahap II, memo kepada humas dan kerjasama untuk peliputan.

Koordinasi dengan Kantor Wilayah

- 03.04** Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dengan kantor wilayah terkait dengan program kepatuhan persaingan usaha.

Pelaksanaan Sosialisasi

- 03.05** Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka program kepatuhan persaingan usaha, meliputi : memo/surat untuk mengundang pembicara/narasumber (baik dari internal maupun eksternal), materi sosialisasi, daftar hadir, lembar evaluasi, laporan kegiatan.

Penetapan Program Kepatuhan

- 03.06** Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan dari Majelis Komisi terkait penetapan program kepatuhan terhadap pelaku usaha.

Rapat Komisi Jika Usulan Berdasarkan Inisiatif Komisi

- 03.07** Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan berdasarkan inisiatif komisi dalam program kepatuhan terhadap pelaku usaha, meliputi :
- 1) Risalah Rapat Komisi jika usulan berdasarkan inisiatif Komisi;
 - 2) Memo Koordinasi awal dengan Kanwil, jika akan dilakukan di wilayah Kanwil;
 - 3) Memo Koordinasi dengan Biro Hukum jika usulan Program Kepatuhan tersebut berdasarkan mandatory Putusan.

Pemantauan Program Kepatuhan kepada Pelaku Usaha

- 03.08** Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan program kepatuhan kepada pelaku usaha.

AD.04 Pengembangan Modul

04.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan pengembangan modul yang berkaitan dengan persaingan usaha, berkasnya meliputi :

- 1) Kerangka Acuan Kerja;
- 2) Risalah Rapat Kerja dengan eselon II lain Usulan Modul yang akan dibuat;
- 3) Referensi modul;
- 4) SK Satuan Tugas;
- 5) Memo koordinasi dengan eselon II lain;

04.02 Pelaksanaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan modul yang berkaitan dengan persaingan usaha, berkasnya meliputi :

- 1) Surat Undangan Narasumber;
- 2) Risalah Rapat dengan Narasumber;
- 3) Surat Permohonan Tenaga Ahli;
- 4) Dokumen Pertanggungjawaban Tenaga Ahli;
- 5) Modul Baru;
- 6) Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Modul;
- 7) Presentasi Pengembangan Modul.

Penetapan Modul

04.03

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan modul yang berkaitan dengan persaingan usaha.

**IN
IN.01**

INVESTIGASI

Klarifikasi Laporan Pelanggaran Persaingan Usaha

01.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan klarifikasi laporan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha, berkasnya meliputi:

- 1) Laporan dari masyarakat;
- 2) Memo pemberitahuan laporan yang diterima Kantor Wilayah;
- 3) SK Tim Satgas Klarifikasi Laporan;
- 4) Surat undangan klarifikasi;
- 5) Surat permintaan dokumen.

01.02 Kegiatan Klarifikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan klarifikasi laporan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha, berkasnya meliputi:

- 1) Berita Acara Klarifikasi;
- 2) Daftar hadir;
- 3) Memo kegiatan klarifikasi;
- 4) Kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain-lain);
- 5) Memo undangan rapat dan notulen rapat (internal);
- 6) Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas;
- 7) Laporan hasil klarifikasi: Laporan, Daftar Simak, Abstraksi, Disposisi pimpinan;
- 8) Memo penyampaian laporan hasil klarifikasi dari Koordinator Tim Satgas dan Kantor Wilayah;
- 9) Materi Presentasi hasil klarifikasi laporan;
- 10) Surat pemberitahuan perkembangan laporan;
- 11) Memo pelimpahan laporan hasil klarifikasi ke unit lain (jika ditindaklanjuti);

Pelimpahan Laporan Hasil Klarifikasi

01.03 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelimpahan laporan hasil klarifikasi laporan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha, berkasnya meliputi:

- 1) Berita Acara pelimpahan;
- 2) Laporan hasil klarifikasi;
- 3) Dokumen pendukung (jika ditindaklanjuti);
- 4) Dokumen tambahan (jika dibutuhkan oleh satgas/ investigator).

IN.02

Penelitian Perkara Inisiatif

02.01 Sumber Penelitian Perkara Inisiatif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian perkara inisiatif yang sumber penelitiannya perkara inisiatif termasuk dari kantor wilayah, meliputi :

- Laporan hasil monitoring pelaku usaha
- Laporan evaluasi kebijakan
- Laporan pengawasan penggabungan/ peleburan/ merger
- Laporan pengambilalihan/akuisisi saham/asset
- Laporan pembentukan usaha patungan

Persiapan Penelitian

02.02 Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan penelitian perkara inisiatif, meliputi :

- SK Tim Satgas Penelitian Perkara Inisiatif
- Surat undangan diskusi
- Surat permintaan dokumen
- Surat undangan diskusi

Kegiatan Penelitian Perkara Inisiatif

02.03 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian perkara inisiatif, meliputi :

- Risalah hasil diskusi;
- Daftar hadir;
- kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain-lain);
- Surat undangan rapat dan notula rapat,
- Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas;
- Laporan hasil penelitian perkara inisiatif: Laporan, Abstraksi, Disposisi pimpinan;
- Memo penyampaian laporan hasil penelitian perkara inisiatif dari Kantor Wilayah;
- Materi presentasi hasil penelitian perkara inisiatif dalam rapat komisi/ rapat koordinasi.

Pelimpahan Laporan Hasil Klarifikasi

02.04 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelimpahan laporan hasil klarifikasi dalam rangka kegiatan penelitian perkara inisiatif, meliputi berita acara pelimpahan hasil klarifikasi, laporan hasil klarifikasi dan dokumen pendukung.

IN.03

Penyelidikan

03.01 Sumber Penyelidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan yang berasal dari laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil penelitian perkara inisiatif termasuk dari Kantor Wilayah.

03.02 Persiapan Penyelidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan penyelidikan meliputi Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Penyelidikan.

03.03 Kegiatan Penyelidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan berkasnya meliputi:

- Surat panggilan;
- Surat permintaan dokumen;
- Surat permintaan keterangan pemerintah;
- Surat permintaan keterangan ahli;
- Surat peminjaman ruangan (eksternal);
- Surat pemberitahuan penyelidikan lapangan
- Berita acara penyelidikan;
- Daftar hadir;
- Risalah hasil diskusi;
- Kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain-lain);
- Undangan rapat dan notula rapat (internal);
- Surat Tugas perjalanan dinas dan Laporan perjalanan dinas (jika ada)

- Laporan hasil penyelidikan;
- Materi Presentasi hasil penyelidikan;
- Memo penyampaian hasil penyelidikan dari Satuan Tugas dan Kantor Wilayah.

Pelimpahan Laporan Hasil Penyelidikan

03.04 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelimpahan laporan hasil penyelidikan, meliputi:

- Memo Penyampaian berkas laporan hasil penyelidikan ke Direktorat Penindakan;
- Berita Acara pelimpahan hasil penyelidikan;
- Laporan hasil penyelidikan;
- dokumen pendukung.

IN.04 Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku

04.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan pengawasan pelaksanaan perubahan perilaku, berkasnya meliputi:

- Berita acara hasil pemeriksaan pendahuluan;
- Pakta Integritas;
- SK Tim Satuan Tugas;
- Surat Panggilan;
- Surat Permintaan dokumen;
- Surat Pemberitahuan penyelidikan lapangan.

04.02

Kegiatan Pengawasan Perubahan Perilaku

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan perubahan perilaku, meliputi Berita Acara pengawasan, Daftar hadir dan kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain-lain) serta laporan hasil pengawasan pelaksanaan perubahan perilaku.

MA MERGER DAN AKUISISI

MA.01 Pengawasan Merger dan Akuisisi

01.01 Sumber Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan merger dan akuisisi atas penggabungan, pengambilalihan dan peleburan Badan Usaha (merger, akuisisi, konsolidasi) yang sumber informasinya berasal dari masyarakat, berita media massa, surat resmi dari instansi pemerintah, sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

01.02

Pelaksanaan Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan atas penggabungan, pengambilalihan dan peleburan Badan Usaha (merger, akuisisi, konsolidasi) meliputi surat Permohonan Klarifikasi atas dugaan keterlambatan, daftar hadir, risalah rapat dan kelengkapan dokumen lainnya, dan laporan hasil pengawasan.

MA.02 Konsultasi Badan Usaha

02.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan konsultasi untuk penggabungan, pengambilalihan dan peleburan Badan Usaha (merger, akuisisi, konsolidasi), meliputi :

- Formulir Konsultasi;
- Surat Kuasa;
- Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
- Skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah penggabungan;
- Anggaran Dasar;
- Profil Badan Usaha;
- Ringkasan Penggabungan;
- Rencana Bisnis;
- Analisis Dampak Penggabungan;
- Tanda Terima yang memuat Nomor Registrasi Konsultasi.

02.02 Kegiatan Konsultasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan konsultasi untuk penggabungan, pengambilalihan dan peleburan Badan Usaha (merger, akuisisi, konsolidasi), meliputi :

- Surat Undangan Klarifikasi;
- Daftar hadir,
- Risalah Rapat;
- Kelengkapan Dokumen;
- Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas;
- Laporan Konsultasi;

Konsultasi Yang Tidak Masuk Tahap Penilaian

02.03 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi badan usaha yang tidak masuk tahap penilaian, berkasnya meliputi penetapan Komisi Tidak Wajib Notifikasi dan BAST (Berita Acara Serah Terima).

MA.03 Notifikasi

03.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan pelaksanaan penerimaan berkas notifikasi dari badan usaha yang telah melakukan penggabungan, pengambilalihan dan peleburan (merger, akuisisi, konsolidasi), meliputi :

- Formulir A1;
- Surat Kuasa;
- Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
- Skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah penggabungan;
- Anggaran Dasar;
- Profil Badan Usaha;
- Dokumen yang menunjukkan berlaku efektif secara Yuridis;
- Ringkasan Penggabungan;
- Rencana Bisnis;
- Analisis Dampak Penggabungan;
- Tanda Terima yang memuat Nomor Registrasi Konsultasi;
- Surat Undangan Klarifikasi;
- Daftar hadir, Risalah Rapat dan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas;
- Laporan Notifikasi.

Kegiatan Konsultasi Yang Tidak Masuk Tahap Penilaian

03.02

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi yang tidak masuk tahap penilaian berkasnya meliputi Penetapan Komisi Tidak Wajib Notifikasi, BAST (Berita Acara Serah Terima).

MA.04 Penelitian Inisiatif dan Penyelidikan Merger dan Akuisisi

04.01 Penelitian Inisiatif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian inisiatif merger dan akuisisi yang ditujukan untuk melengkapi data dan dokumen terkait pemenuhan batasan nilai yang ditetapkan dan tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan tersebut berlaku efektif secara yuridis, termasuk berkas dari pelaku usaha, dokumen tambahan, korespondensi, informasi dari masyarakat, berita media massa, surat resmi dari instansi pemerintah, serta sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Berkasnya meliputi :

- Berkas pelaku usaha;
- Dokumen tambahan;
- Informasi dari masyarakat, berita media massa, surat resmi dari instansi pemerintah, sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

04.02 Penyelidikan Merger dan Akuisisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan merger dan akuisisi yang ditujukan untuk melengkapi data dan dokumen terkait pemenuhan batasan nilai yang ditetapkan dan tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan tersebut berlaku efektif secara yuridis, termasuk berkas dari pelaku usaha, dokumen tambahan, korespondensi, informasi dari masyarakat, berita media massa, surat resmi dari instansi pemerintah, serta sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Berkasnya meliputi :

- Dokumen laporan atau penelitian inisiatif merger dan akuisisi;
- SK Tim Satgas Penyelidikan merger dan akuisisi;
- Surat Panggilan;
- Surat Permintaan dokumen;
- Surat Permintaan keterangan Pemerintah;
- Surat Permintaan keterangan Ahli;
- Surat Pemberitahuan penyelidikan lapangan;
- Berita Acara penyelidikan,
- Daftar hadir;
- kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain-lain);
- Surat undangan rapat dan notula rapat;
- Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas;
- Laporan hasil penyelidikan.

Penyampaian Laporan Hasil Penyelidikan ke Direktorat Penindakan

04.03

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian laporan hasil penyelidikan ke Direktorat Penindakan dalam rangka penyelidikan merger dan akuisisi, berkasnya meliputi :

- Memo penyampaian laporan hasil penyelidikan ke pemberkasan Direktorat Penindakan;
- Materi presentasi hasil penyelidikan;
- Berita Acara pelimpahan laporan hasil penyelidikan: Laporan

- hasil penyelidikan dan dokumen pendukung ;
- Surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan;
- Dokumen tambahan;
- Laporan hasil penyelidikan dan dokumen pendukung.

MA.05 Penilaian Merger dan Akuisisi

05.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan penilaian merger dan akuisisi, berkasnya meliputi :

- Formulir A1;
- Surat Kuasa;
- Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
- Skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah penggabungan;
- Anggaran Dasar;
- Profil Badan Usaha;
- Dokumen yang menunjukkan berlaku efektif secara Yuridis;
- Ringkasan Penggabungan;
- Rencana Bisnis;
- Analisis Dampak Penggabungan;
- Tanda Terima yang memuat Nomor Registrasi Konsultasi;
- Surat Undangan Klarifikasi.

05.02 Kegiatan Penilaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian merger dan akuisisi, berkasnya meliputi daftar hadir, risalah rapat, kelengkapan dokumen, Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas; dan Laporan Notifikasi.

05.03 Notifikasi yang Tidak Masuk Tahap Penilaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan notifikasi yang tidak masuk tahap penilaian meliputi Ketetapan Komisi Tidak Wajib Notifikasi dan BAST (Berita Acara Serah Terima).

PK PENGAWASAN KEMITRAAN

PK.01 Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan

01.01 Persiapan Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan, meliputi:

- berkas dari pelaku Usaha;
- korespondensi meliputi koordinasi dengan instansi terkait;
- naskah perjanjian kerja sama;
- surat undangan rapat dan notulen rapat
- surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas;

01.02 Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pelanggaran pelaksanaan Kemitraan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan laporan kegiatan pengawasan dan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.

PK.02 Klarifikasi Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan Persiapan

02.01 Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan koordinasi pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, meliputi:

- Laporan dari masyarakat;
- Memo pemberitahuan laporan yang diterima Kantor Wilayah;
- SK Tim Satgas Klarifikasi Laporan;
- Surat permintaan kelengkapan laporan;
- Surat undangan klarifikasi;
- Surat Permintaan dokumen.

02.02

Kegiatan Klarifikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan klarifikasi pelaksanaan kemitraan, meliputi :

- Berita Acara Klarifikasi;
- Memo kegiatan klarifikasi;
- Daftar hadir;
- kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain-lain);
- Surat undangan rapat dan notulen rapat;
- Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas;
- Laporan hasil klarifikasi;
- Memo penyampaian laporan hasil klarifikasi dari Kantor Wilayah;
- Presentasi hasil klarifikasi laporan;
- Surat pemberitahuan perkembangan laporan;
- Memo pelimpahan laporan hasil klarifikasi ke unit lain

PK.03

Perumusan Usulan Perkara Inisiatif Kemitraan

03.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan perumusan usulan perkara inisiatif kemitraan, meliputi:

- Laporan hasil pengawasan kemitraan;
- Kesimpulan Rapat Komisi atau Rapat Koordinasi;
- Memo pemberitahuan perkara inisiatif kemitraan yang diterima Kantor Wilayah;
- SK Tim Satgas Penelitian Perkara Inisiatif Kemitraan;
- Surat undangan diskusi;
- Surat Permintaan dokumen;
- Surat undangan diskusi dan permintaan dokumen;

03.02

Kegiatan Perumusan Penelitian Perkara Inisiatif Kemitraan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian perkara inisiatif kemitraan, meliputi :

- Risalah hasil diskusi;
- Daftar hadir;
- kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain-lain);
- Surat undangan rapat dan notulen rapat;
- Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas;
- Laporan hasil penelitian perkara inisiatif kemitraan;
- Materi Presentasi hasil penelitian perkara inisiatif.

PK.04

Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I

04.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I, meliputi:

- Laporan hasil klarifikasi atau laporan hasil penelitian perkara

inisiatif;

- SK Tim Pemeriksaan Pendahuluan Tahap I ;
- Surat panggilan;
- Surat Permintaan dokumen;
- Surat Permintaan keterangan Pemerintah;
- Surat Permintaan keterangan Ahli;
- Surat Pemberitahuan pemeriksaan lapangan;

04.02 Kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan Tahap I

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tahap I meliputi :

- Berita Acara Pemeriksaan,
- Daftar hadir dan kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain-lain);
- Surat undangan rapat dan notulen rapat;
- Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas;
- Laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I;

04.03 Penyampaian Hasil Pemeriksaan Tahap I

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian hasil pemeriksaan tahap I, meliputi memo penyampaian hasil Pemeriksaan Tahap I dari Kantor Wilayah, serta materi presentasi hasil pemeriksaan Tahap I;

PK.05 Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap II

05.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap II, meliputi:

- Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan;
- SK Tim Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II.

05.02 Kegiatan Peringatan Tertulis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peringatan tertulis dalam rangka pemeriksaan pendahuluan Kemitraan Tahap II, meliputi:

- Surat panggilan;
- Tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan;
- Surat undangan rapat dan notulen rapat;
- Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas;
- Presentasi hasil Pemeriksaan Tahap II meliputi : notulen / risalah rapat komisi;
- Kesimpulan Rapat Komisi atau Rapat Koordinasi atas rekomendasi Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II;
- Surat Penyampaian Peringatan Tertulis;
- Surat Peringatan Tertulis I;
- berita Acara penyampaian peringatan tertulis,
- Daftar Hadir, dan
- Dokumen kelengkapan lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lainnya);
- Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan Tahap II.

PK.06 Pemantauan Pelaksanaan Peringatan Tertulis

06.01 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan pemantauan kegiatan peringatan tertulis Kemitraan, meliputi SK Tim Pemantauan kegiatan peringatan tertulis kemitraan Pendahuluan

Tahap II, Surat undangan permintaan klarifikasi dan undangan rapat dan notula rapat.

06.02

Kegiatan Pemantauan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan kegiatan peringatan tertulis Kemitraan, meliputi Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas, dan notula presentasi hasil peringatan tertulis di Rapat Komisi, dan Laporan hasil pemantauan peringatan tertulis.

PK.07

Pengawasan Hasil Penetapan Kemitraan

07.01 Sumber

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sumber pengawasan hasil penetapan Kemitraan, termasuk Laporan Hasil Pemantauan Peringatan Tertulis, Notula Rapat Komisi atau Rapat Koordinasi tentang Hasil Pelaksanaan Peringatan Tertulis oleh Terlapor dan penerbitan Penetapan Komisi tentang Penghentian Perkara dan perintah untuk memasukkan penghentian perkara tersebut ke Buku Daftar Pengawasan, Surat Penetapan Komisi tentang Penghentian Perkara, dan Buku Daftar Pengawasan.

07.02 Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Hasil Penetapan Kemitraan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan pelaksanaan pengawasan hasil penetapan kemitraan, meliputi SK Tim pengawasan hasil penetapan, Surat panggilan pengawasan hasil penetapan, undangan rapat dan notula rapat, Surat Tugas Perjalanan Dinas dan Laporan perjalanan dinas.

07.03 Pelaksanaan Pengawasan Hasil Penetapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan hasil penetapan kemitraan, meliputi laporan hasil pengawasan atas penetapan kemitraan, materi presentasi hasil pengawasan atas penetapan kemitraan di rapat komisi, Surat Keputusan Penghentian Pengawasan Hasil Penetapan Kemitraan dan Surat Penyampaian Salinan Keputusan Penghentian Pengawasan Hasil Penetapan Kemitraan.

PN

PENINDAKAN

PN.01

Penindakan Perkara

01.01 Pemberkasan Perkara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberkasan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat termasuk pelaksanaan gelar perkara, berkasnya meliputi :

- BAST Laporan Hasil Penyelidikan (Perkara Inisiatif dan Laporan)/Laporan Keterlambatan Pemberitahuan beserta Berkas Dokumen Perkara (Perkara Merger);
- Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Keterlambatan Pemberitahuan (Merger);
- BAST Berkas Dokumen Perkara dari Penindakan ke Panitera

01.02 Pelaksanaan Litigasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi pelaksanaan litigasi, berkasnya meliputi:

- 1) Relas Panggilan Sidang Pengadilan Negeri terkait keberatan

- putusan KOMISI;
- 2) Memori Keberatan Pemohon Keberatan;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara KOMISI dari Kepaniteraan ke Direktorat Penindakan ;
 - 4) Salinan Putusan KOMISI;
 - 5) Berkas Perkara A mulai dari surat-menyurat sampai SK;
 - 6) Berkas perkara B termasuk Berita Acara;
 - 7) Berkas Perkara C termasuk dokumen perkara;
 - 8) Berkas Perkara T termasuk dokumen terlapor;
 - 9) Berkas Perkara I termasuk dokumen investigator;
 - 10) List Dokumen Berkas Perkara A,B,C,T,I;
 - 11) Penjelasan Memori Keberatan;
 - 12) Surat Kuasa di Tingkat Pengadilan Negeri;
 - 13) Memo penandatanganan surat kuasa;
 - 14) Surat permohonan penetapan penggabungan perkara kepada mahkamah agung;
 - 15) Surat permohonan penetapan penggabungan perkara kepada Pengadilan Niaga;
 - 16) Surat tugas perjalanan dinas;
 - 17) Laporan perjalanan dinas;
 - 18) Permohonan Penundaan Sidang kepada majelis hakim;
 - 19) Surat Penetapan Penggabungan Perkara oleh Mahkamah Agung;
 - 20) Replik;
 - 21) Duplik;
 - 22) Kesimpulan Pemohon dan Termohon;
 - 23) Putusan Pengadilan Niaga;
 - 24) Surat permohonan salinan putusan dari KOMISI ke ketua PN;
 - 25) Relas Penyampaian Pernyataan Kasasi;
 - 26) Relas Penyampaian Memori Kasasi;
 - 27) Relas Penyampaian Kontra Memori Kasasi;
 - 28) Surat Kuasa di Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi);
 - 29) Memori Kasasi oleh KOMISI selaku Pemohon Kasasi ;
 - 30) Surat Kuasa Untuk Membayar Pendaftaran Kasasi;
 - 31) Tanda Terima/Akta Penyampaian Memori Kasasi;
 - 32) Memori Kasasi Terlapor selaku Pemohon Kasasi ;
 - 33) Kontra Memori Kasasi oleh Terlapor selaku Termohon Kasasi;
 - 34) Kontra Memori Kasasi oleh KOMISI selaku Termohon kasasi;
 - 35) Surat Penyampaian Berkas Perkara Kasasi dari Pengadilan Niaga ke Mahkamah Agung;
 - 36) Penerimaan dan Register Berkas Perkara Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - 37) Surat Pemberitahuan Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Kasasi;
 - 38) Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi;
 - 39) Putusan Kasasi Mahkamah Agung;
 - 40) Relas pemberitahuan pernyataan peninjauan kembali;
 - 41) Relas penyampaian memori peninjauan kembali;
 - 42) Memori peninjauan kembali Terlapor selaku Pemohon PK;
 - 43) Relas panggilan sidang pengadilan negeri untuk pemeriksaan Novum peninjauan kembali;
 - 44) Surat Kuasa di Tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali);
 - 45) Kontra Memori peninjauan kembali oleh KOMISI selaku Termohon PK;
 - 46) Tanda Terima/Akta Penyampaian kontra Memori Kasasi;
 - 47) Surat Penyampaian Berkas Perkara Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung;

- 48) Penerimaan dan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 49) Surat Pemberitahuan Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Peninjauan Kembali;
- 50) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung ;
- 51) Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali;
- 52) Surat permohonan salinan putusan peninjauan kembali kepada ketua Pengadilan Niaga;
- 53) Berita Serah Terima Putusan Inkracht kepada unit pelaksana eksekusi.

SM
SM.01

SIDANG MAJELIS (KEPANITERAAN)

Persidangan Majelis Komisi

01.01 Dokumen Pra Pemeriksaan Pendahuluan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pra pemeriksaan pendahuluan dalam rangka kegiatan pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait pelanggaran persaingan usaha yang sehat, meliputi :

- Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan;
- Surat Penugasan Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan;
- Surat Penugasan Panitia Pemeriksaan Pendahuluan;
- Surat Penugasan Investigator Penuntutan Pemeriksaan Pendahuluan;
- Surat Penugasan Sekretariat Pemeriksaan Pendahuluan;
- Berkas Perkara dilampiri Daftar Alat bukti investigator beserta
- Berita Acara Serah Terima Dokumen Perkara.

01.02 Dokumen Pemeriksaan Pendahuluan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemeriksaan pendahuluan dalam rangka kegiatan pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait pelanggaran persaingan usaha yang sehat, meliputi:

- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan,
- Surat Panggilan
- Surat Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan
- Laporan Dugaan pelanggaran
- Daftar saksi dan/atau ahli investigator penuntutan
- Daftar saksi dan/atau ahli terlapor (apabila diajukan)
- Berita Acara pemeriksaan pendahuluan
- Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan
- Daftar Alat Bukti Terlapor
- Berita Acara Serah Terima Dokumen pemeriksaan pendahuluan (apabila diajukan).
- Surat Tugas/Surat Kuasa terlapor (apabila diperlukan)

01.03 Dokumen Pra Pemeriksaan Lanjutan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pra pemeriksaan lanjutan dalam rangka kegiatan pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait pelanggaran persaingan usaha yang sehat, berkasnya meliputi:

- Penetapan Pemeriksaan Lanjutan;
- Surat Penugasan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan;
- Surat Penugasan Panitia Pemeriksaan Lanjutan;
- Surat Penugasan Investigator Penuntutan Pemeriksaan Lanjutan;
- Surat Penugasan Sekretariat Pemeriksaan Lanjutan.

Dokumen Pemeriksaan Lanjutan

01.04 Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemeriksaan lanjutan dalam rangka kegiatan pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait pelanggaran persaingan usaha yang sehat, berkasnya meliputi:

- Surat pemberitahuan pemeriksaan lanjutan
- Surat pemberitahuan jadwal sidang
- Surat pemberitahuan saksi ahli
- Surat panggilan
- Tambahan alat bukti (apabila ada)
- Berita Acara pemeriksaan lanjutan
- Kesimpulan investigator penuntutan
- Kesimpulan terlapor (apabila ada)
- Daftar berkas perkara beserta kode dokumen (A,B,C,I,T).

Dokumen Musyawarah Majelis Komisi

01.05 Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Musyawarah Majelis Komisi, meliputi :

- Penetapan Musyawarah Majelis Komisi;
- Surat Penugasan Majelis Komisi Musyawarah Majelis Komisi;
- Surat Penugasan Panitera Musyawarah Majelis Komisi;
- Surat Penugasan Sekretariat Musyawarah Majelis Komisi;
- Surat Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi;
- Surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Komisi; dan
- Berita Acara Pembacaan Putusan Komisi.

Dokumen Putusan Komisi

01.06 Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen putusan persidangan Sidang Majelis Komisi, meliputi:

- Petikan Pemberitahuan Putusan Komisi;
- Putusan Komisi;
- Salinan Putusan Komisi;
- Berita acara serah terima putusan Komisi

SM.02

Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Kepaniteraan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan urusan kepaniteraan yaitu pelatihan-pelatihan dan keikutsertaan dengan unit lain, meliputi memo kegiatan pembinaan, notula rapat pembinaan, laporan kegiatan pembinaan.

EK

EKSEKUSI

EK.01

Eksekusi Putusan KOMISI

01.01 **Persiapan**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan eksekusi dan pemantauan pelaksanaan putusan Komisi, meliputi:

- 1) Memo pemberitahuan perkara Komisi telah diputus dari Kepala Panitera;
- 2) Berita Acara Serah Terima Putusan Komisi telah berkekuatan Hukum Tetap dari Kepaniteraan; Salinan Putusan Komisi;
- 3) Berita Acara Serah Terima Putusan Komisi telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Pengadilan Negeri dan/atau Kasasi Mahkamah Agung dari Unit Kerja Litigasi; Salinan Putusan PN, Putusan Kasasi Mahkamah Agung;

Kegiatan Eksekusi

- 01.02** Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan eksekusi dan pemantauan pelaksanaan putusan Komisi, meliputi:
- 1) Disposisi Pimpinan perihal Perintah pencatatan piutang denda;
 - 2) Buku piutang;
 - 3) Memo kepada Bagian Keuangan perihal putusan berkekuatan hukum tetap;
 - 4) Memo kepada Bagian Hubungan Masyarakat perihal Daftar Perusahaan yang dilarang mengikuti tender;
 - 5) Penerbitan Surat Pelaksanaan Putusan I sampai dengan III kepada masing-masing terlapor;
 - 6) Penerbitan Surat Larangan Tender;
 - 7) Surat pemberitahuan pelaksanaan putusan dari terlapor;
 - 8) Surat permohonan cicilan denda;
 - 9) Surat Jawaban atas permohonan cicilan denda dari Komisi;
 - 10) Memo dari Bagian keuangan hal penerbitan surat keterangan tanda lunas;
 - 11) Penerbitan surat keterangan tanda lunas;
 - 12) Perjalanan Dinas; Surat Tugas Perjalan Dinas;
 - 13) Penerbitan Surat Somasi dan Sosialisasi Piutang Denda;
 - 14) Penerbitan Surat Permohonan Penetapan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang;
 - 15) Salinan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga yang berwenang;
 - 16) Penerbitan Surat pelimpahan Putusan Komisi kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia;
 - 17) Berita Acara Serah Terima Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dari unit kerja litigasi;
 - 18) Memo kepada bagian keuangan perihal pengembalian piutang denda yang telah dibayarkan;
 - 19) Surat permohonan keterangan bebas tanggungan berperkara;
 - 20) Penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara;
 - 21) Daftar terlapor belum melaksanakan putusan Komisi;
 - 22) Daftar hitam pelaku usaha.

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH